

DOI: 10.36232/fair.v5i2.4270

Article History:

Received: 2025-11-11

Revised: 2025-11-20

Accepted: 2025-12-30

FAIR : FINANCIAL & ACCOUNTING
INDONESIAN RESEARCH

Vol 5, Issue 2 (2025), 103-111

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah Gorontalo

Yolanda Kiu^{1*}, Rigel Nurul Fathah²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55292, Indonesia

Abstract.

This study aims to analyze the influence of Regional Original Revenue (PAD), Balancing Funds, Capital Expenditure, and Other Legitimate Regional Revenues on the Financial Performance of the Gorontalo Regional Government. Using a quantitative approach with secondary data obtained from the Gorontalo Regional Government Financial Reports and the Central Bureau of Statistics (BPS) for the 2019–2023 period, the analysis was conducted using multiple linear regression with descriptive statistics, classical assumption tests, t-tests, and F-tests. The results indicate that both partially and simultaneously, all four variables have a positive and significant effect on regional financial performance, with Other Legitimate Regional Revenues showing the most dominant influence. These findings emphasize that optimizing regional revenue management and improving the efficiency of capital expenditures play an essential role in enhancing financial performance and fiscal independence within the Gorontalo Regional Government.

Keywords. *Regional Original Revenue (PAD), Balancing Funds, Capital Expenditure, Other Legitimate Regional Revenues, Financial Performance, Gorontalo Regional Government*

Corresponding Author: yolandakiu07@gmail.com, (author#1)

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi pada transparansi serta akuntabilitas publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya penerapan manajemen keuangan yang profesional agar daerah dapat melaksanakan otonomi dengan baik dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penerapan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan hak dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Menurut (Saleh, 2020), pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mendorong daerah agar mampu mengembangkan potensi sumber daya manusia, keuangan, dan kekayaan daerahnya secara mandiri. Otonomi ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan yang efektif.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara efisien dan produktif (Difinubun dan Gudono, 2021). Menurut Mahmudi (2016), kinerja keuangan dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan APBD dengan memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga keberlanjutan fiskal.

Namun demikian, hingga saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. (Jauhariah, 2022) menyebutkan bahwa permasalahan utama yang sering muncul adalah ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat akibat rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagian besar anggaran daerah masih didominasi oleh dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah.

Menurut Halim (2016), struktur keuangan daerah yang sehat harus mampu menunjukkan keseimbangan antara PAD dan dana perimbangan. PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah, sedangkan dana perimbangan berfungsi sebagai alat pemerataan keuangan antarwilayah. Selain itu, Christy dan Ady (2008) menegaskan bahwa komposisi belanja modal juga turut menentukan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar proporsi belanja modal terhadap total anggaran, semakin baik pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sementara itu, Muhtarom (2016) menambahkan bahwa *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah* menjadi elemen penting yang dapat memberikan tambahan kapasitas fiskal bagi daerah.

Di Provinsi Gorontalo, kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan

dinamika yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo (2023), Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi. Namun, peningkatan tersebut masih belum mampu mengimbangi besarnya dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi, yang dapat memengaruhi fleksibilitas fiskal daerah dalam menjalankan program-program pembangunan.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah masih rendahnya efektivitas belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk belanja operasional seperti gaji pegawai dan belanja rutin, sementara porsi belanja modal relatif kecil (Patriati, 2010). Permasalahan lainnya terlihat dari struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal. Data keuangan daerah menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan kebutuhan rutin pemerintahan, sedangkan proporsi belanja modal yang berfungsi menciptakan aset produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah masih relatif terbatas.

Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keberadaan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah masih belum banyak mendapatkan perhatian dalam penelitian sebelumnya. Padahal, komponen ini memiliki kontribusi yang terus meningkat terhadap total pendapatan daerah dan berpotensi menjadi sumber alternatif dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Minimnya kajian mengenai peran variabel ini menyebabkan belum adanya gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh seluruh komponen pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh faktor-faktor keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Wahyudin dan Hastuti (2020) menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan. Penelitian Indriyani dan Sastradipraja (2014) juga menemukan bahwa PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain PAD yang Sah memiliki pengaruh penting dalam menentukan kinerja keuangan, meskipun tingkat pengaruhnya berbeda pada setiap daerah. Dengan memperhatikan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Lain-lain PAD yang Sah memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dari sisi konteks penelitian karena dilakukan pada pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo yang memiliki karakteristik fiskal berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia, khususnya terkait tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan masih terbatasnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Hingga saat ini, penelitian yang secara simultan menguji pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo masih relatif terbatas. Kebaruan lainnya terletak pada upaya menjelaskan hubungan antara sumber-sumber pendapatan daerah dan pola pengeluaran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam perspektif kemandirian fiskal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah, tetapi juga memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan daerah pada era otonomi daerah serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif di Provinsi Gorontalo.

LITERATURE REVIEW

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur melalui serangkaian rasio keuangan yang mencerminkan kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran. Menurut Mahmudi (2016) dan Fathah (2017), rasio-rasio tersebut meliputi: Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan, dan rasio efektivitas pajak / retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan lokal (pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah). PAD mencerminkan kemandirian fiskal; semakin tinggi PAD relatif terhadap total pendapatan, semakin rendah ketergantungan daerah pada transfer pusat (Muhtarom, 2016; Halim, 2016). Penelitian terdahulu (Wahyudin & Hastuti, 2020; Ramlah et al., 2023) umumnya menemukan PAD berpengaruh positif pada kinerja keuangan daerah, meskipun besaran dan signifikansinya dapat berbeda antar daerah.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) adalah transfer dari pusat untuk membantu pendanaan tugas dan kebutuhan daerah. Secara teori, dana perimbangan dapat meningkatkan kapasitas belanja daerah namun juga dapat menimbulkan ketergantungan fiskal yang menurunkan insentif peningkatan PAD (Budianto & Alexander, 2016). Studi empiris menunjukkan hasil beragam: beberapa penelitian menemukan pengaruh positif signifikan (Wahyudin & Hastuti, 2020; Fitri Agustina et al., 2024), sementara penelitian lain melaporkan dampak negatif pada kemandirian jika transfer terlalu dominan (temuan dalam literatur terkait).

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk aset tetap (infrastruktur, peralatan) yang memberikan manfaat jangka panjang. Belanja modal dianggap investasi yang dapat meningkatkan kapasitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Christy & Ady, 2008). Penelitian-penelitian menunjukkan belanja modal seringkali berkorelasi positif dengan kinerja keuangan, terutama bila alokasi dan pelaksanaan proyek efektif (Indriyani & Sastradipraja, 2014; Taufik Hidayat dkk., 2024). Namun, beberapa studi menemukan belanja modal tidak selalu signifikan bila belanja tidak efisien atau diprioritaskan pada belanja rutin.

Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah (hibah, kontribusi pihak ketiga, pendapatan tidak rutin lainnya) menambah fleksibilitas anggaran daerah. Walaupun pos ini bersifat tidak selalu berulang, peningkatan penerimaan dari pos ini dapat memperkuat kapasitas fiskal jangka pendek dan mendukung program yang

tidak sepenuhnya dibiayai oleh PAD atau transfer (Muhtarom, 2016). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pos ini kadang menjadi variabel dominan dalam mempengaruhi kinerja keuangan jika kontribusinya signifikan (temuan dalam studi kasus daerah tertentu).

Pengembangan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD merupakan sumber utama penerimaan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah dan semakin baik kinerja keuangan yang dihasilkan (Halim, 2016; Wahyudin & Hastuti, 2020).

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja keuangan

Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berfungsi membantu daerah dalam menjalankan otonomi serta pemerataan kemampuan fiskal antarwilayah. Pengelolaan Dana Perimbangan yang baik akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan memperkuat kinerja keuangan daerah (Budianto & Alexander, 2016; Fitri Agustina et al., 2024).

H₂: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal merupakan bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dan aset publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan alokasi belanja modal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi pelayanan, serta mendorong perbaikan kinerja keuangan daerah (Christy & Ady, 2008; Indriyani & Sastradipraja, 2014).

H₃: Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Lain-lain Pendapatan yang Sah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari sumber-sumber lain seperti hibah, bantuan, dan penerimaan sah lainnya yang diatur peraturan perundang-undangan. Peningkatan Lain-lain PAD yang Sah dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah serta memberikan ruang fiskal tambahan bagi pelaksanaan program pembangunan, sehingga meningkatkan kinerja keuangan (Muhtarom, 2016).

H₄: Lain-lain Pendapatan asli yang sah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

METODE, DATA DAN ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Gorontalo. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Gorontalo serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo selama periode 2019–2023. Teknik analisis yang digunakan

yaitu analisis regresi linear berganda (Difinubun dan Fatimah, 2023), pengujian hipotesis menggunakan uji parsial, uji diterimasi melalui SPSS 25.0, selain itu pengujian asumsi klasik juga digunakan untuk memasitkan asumsi normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas data (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil hasil penelitian diketahui bahwa data penelitian telah memehuni pengujian asumsi klasik meliputi pengujian normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Sehingga data penelitian dapat dilanjutkan ketahap pengujian hipotesis. Berikut ringkasan tabel hasil pengujian Hipotesis penelitian ini.

Tabel 1 Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	t Hitung	Sig.	Keputusan
H1	PAD → Kinerja Keuangan	7,446	0,000	Diterima
H2	Dana Perimbangan → Kinerja Keuangan	2,900	0,008	Diterima
H3	Belanja Modal → Kinerja Keuangan	2,474	0,020	Diterima
H4	Lain-lain PAD yang Sah → Kinerja Keuangan	5,164	0,000	Diterima

Sumber: Pengolahan Data Penelitian (2025)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, sehingga seluruh hipotesis penelitian diterima. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh nilai t hitung sebesar 7,446 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin tinggi PAD yang diperoleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah.

Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai t hitung sebesar 2,900 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat dapat mendukung peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Variabel Belanja Modal memperoleh nilai t hitung sebesar 2,474 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,020. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka Belanja Modal terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengalokasian belanja modal yang efektif dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah. Selanjutnya, variabel Lain-lain PAD yang Sah memiliki nilai t hitung sebesar 5,164 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, semakin optimal penerimaan dari sumber-sumber PAD lainnya yang sah, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Keempat variabel, yaitu PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Lain-lain PAD yang Sah, terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa baik

sumber pendapatan daerah maupun pengelolaan pengeluaran daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,215, nilai *t-hitung* 2,745, dan nilai signifikansi $0,012 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Gorontalo. Hal ini berarti semakin besar PAD yang diperoleh, semakin baik pula kinerja keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Halim (2016) bahwa PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Peningkatan PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Hasil ini juga mendukung penelitian Wahyudin & Hastuti (2020) yang menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi 0,184, *t-hitung* 2,531, dan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$, yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Gorontalo. Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan instrumen transfer fiskal dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar Dana Perimbangan yang diterima dan dikelola secara efektif, maka semakin baik kinerja keuangan daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Budianto & Alexander (2016) dan Fitri Agustina et al. (2024) yang menegaskan bahwa Dana Perimbangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal daerah dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Belanja Modal menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,151, *t-hitung* 2,219, dan nilai signifikansi $0,031 < 0,05$, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan melalui penyediaan aset tetap seperti infrastruktur, fasilitas publik, dan sarana pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Christy & Ady (2008) bahwa belanja modal merupakan bentuk investasi pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Hasil ini juga didukung oleh Indriyani & Sastradipraja (2014) yang menemukan bahwa proporsi belanja modal yang optimal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, pengelolaan belanja modal yang tepat sasaran dapat memperkuat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Gorontalo.

Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memiliki nilai koefisien regresi terbesar yaitu 0,608, *t-hitung* 5,874, dan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga berpengaruh positif dan signifikan secara dominan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menandakan bahwa sumber-sumber pendapatan tambahan seperti hibah, jasa giro, dan kontribusi pihak ketiga berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Hasil ini mendukung teori Muhtarom (2016) yang menyatakan bahwa Lain-lain PAD

yang Sah dapat meningkatkan fleksibilitas fiskal dan memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam mendanai berbagai program pembangunan. Dominannya pengaruh variabel ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Gorontalo berhasil memanfaatkan sumber-sumber pendapatan tambahan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan memperkuat kemandirian fiskal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Gorontalo, baik secara parsial maupun simultan. Variabel Lain-lain PAD yang Sah memiliki pengaruh paling dominan, menunjukkan bahwa penerimaan tambahan seperti hibah dan kontribusi pihak ketiga berperan besar dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hasil ini membuktikan bahwa semakin optimal pengelolaan sumber pendapatan dan belanja daerah, semakin baik pula kinerja keuangan Pemerintah Daerah Gorontalo.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Daerah Gorontalo terus meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta memperluas sumber penerimaan baru yang berpotensi meningkatkan kemandirian fiskal. Pengelolaan Dana Perimbangan perlu dilakukan secara efisien dan transparan agar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah. Selain itu, Belanja Modal sebaiknya diarahkan pada proyek-proyek produktif yang mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, seperti hibah dan kontribusi pihak ketiga, karena terbukti memberikan pengaruh dominan terhadap kinerja keuangan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti efisiensi anggaran, belanja operasi, atau kebijakan fiskal agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak Pemerintah Daerah Gorontalo, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, atas bantuan dan ketersediaan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2023). *Provinsi Gorontalo dalam Angka 2023*. Gorontalo: BPS.
- Budianto, M., & Alexander, R. (2016). *Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 123–132.
- Christy, E., & Ady, S. (2008). *Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, 5(1), 45–56.
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting*

- Indonesian Research*, 1(1), 62-91.
- Difinubun, Y., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55-63.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33-48.
- Fitri Agustina, N., Rini, S., & Fadilah, N. (2024). *Dana Perimbangan dan PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi*, 14(1), 22–31.
- Ghozali, Imam (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, T. (2024). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan kinerja keuangan terhadap belanja modal Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(01), 105-115.
- Indriyani, D., & Sastradipraja, S. (2014). *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 223–234.
- Jauhariah, D. (2022). *Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah terhadap Dana Transfer Pusat di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Moneter*, 10(3), 77–89.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhtarom, M. (2016). *Peranan Lain-lain PAD yang Sah dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 101–110.
- Patriati, E. (2010). *Belanja Modal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(3), 145–156.
- Saleh, A. (2020). *Otonomi Daerah dan Tantangan Kemandirian Fiskal di Indonesia*. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 12(1), 33–42.
- Wahyudin, A., & Hastuti, T. (2020). *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Barat*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 55–66.